

Silabus

Manajemen Keuangan Sektor Publik

DISKRIPSI MATAKULIAH

- Mata Kuliah Manajemen Keuangan Daerah merupakan pendalaman lebih lanjut dari materi Dasar-Dasar Keuangan, dengan lebih menekankan pada aspek manajerial dalam penerapan kebijakan Manajemen Keuangan di dalam proses pengambilan keputusan di berbagai bidang kegiatan sektor publik atau organisasi nir-laba, seperti berbagai satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di kabupaten/kota maupun propinsi seperti dinas, badan, kantor, badan layanan umum seperti rumah sakit, pasar, kebersihan, pendidikan maupun LSM dan berbagai lembaga serta instansi Pemerintah lainnya yang melayani publik atau masyarakat.
- Inti tugas Manajemen Keuangan Daerah adalah *financial decision* dan *investment decision*. *Financial decision* atau keputusan pembelanjaan merupakan upaya organisasi untuk memperoleh dana dari berbagai sumber dana dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan *investment decision* atau keputusan investasi merupakan upaya organisasi untuk mengalokasikan dana ke berbagai bentuk investasi dengan cara efisien dan efektif.
- Konsep, pengertian dasar, strategi dan taktik dalam Manajemen Keuangan Daerah akan didiskusikan dan akan diberikan pula contoh aplikasinya dalam bentuk tugas. Kajian dan diskusi dimulai dengan mengkaji berbagai sumber referensi terkait Manajemen Keuangan Daerah dan pada akhirnya bermuara kepada penugasan sebagai tantangan untuk melihat lebih jauh situasi dalam lingkungan kerja dan juga institusi tempat kerja yang akan lebih menajamkan kemungkinan dari penerapan Manajemen Keuangan Daerah yang tepat dalam situasi anda sendiri dan tempat anda berkarya.

TUJUAN INSTRUKSIONAL

Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu:

- ❖ Memahami pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik agar terwujud sasaran manajemen keuangan daerah yang telah ditentukan. Khususnya, mahasiswa mampu mendefinisikan, menjelaskan pengertian dan konsep dasar manajemen keuangan daerah. Selanjutnya mahasiswa juga mampu menganalisis peluang dan hambatan implementasi manajemen keuangan daerah.
- ❖ Dengan pemahaman itu diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan strategik melalui kemampuan merajut dan mengesekusi strategi manajemen keuangan daerah. Khususnya, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan berbagai taktik dalam manajemen keuangan daerah.
- ❖ Kepekaan dan kejelian seorang mahasiswa dalam mengamati setiap perubahan dan perkembangan itu akan memberikan nilai lebih dalam pemahaman pengelolaan manajemen keuangan daerah secara komprehensif

D. POKOK BAHASAN, DAN SUB POKOK BAHASAN:

No	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	Kegiatan
01	Konsep dan Pengertian Manajemen Keuangan	1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 1.2 Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan 1.3 Perbedaan Manajemen Keuangan Swasta dan Daerah	Pendahuluan, Kuliah, Diskusi,
02	Konsep Cost of Capital	2.1 Biaya masing-masing Sumberdana 2.2 Biaya Modal Rata-Rata Tertimbang	Kuliah, Diskusi, Tugas kecil 01
03	Konsep Capital Budgeting	3.1 Menaksir Aliran Kas 3.2 Kriteria Penilaian Usulan Investasi	Kuliah, Diskusi, Tugas kecil 02
04	Konsep Penilaian Kinerja Swasta dan Sektor Publik	4.1 Pengertian Rasio Keuangan 4.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan 4.3 Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah 4.4 Pendekatan 4 Kuadran 4.5 LAKIP	Kuliah, Diskusi, Tugas kecil 03
05	Manajemen Pendapatan Asli Daerah	5.1 Hasil Pajak Daerah 5.2 Hasil Retribusi Daerah 5.3 Hasil BUMD 5.4 Lain-Lain PAD yang sah	Kuliah, Diskusi, Tugas kecil 04
06	Manajemen Dana Perimbangan	6.1 Bagian Daerah dari penerimaan (PBB, BPHTB, SDA, PPh) 6.2 DAU (Dana Alokasi Umum) 6.3 DAK (Dana Alokasi Khusus)	Kuliah, Diskusi, Tugas kecil 05
07	Manajemen Dana Lain Penerimaan yang sah	7.1 Hibah 7.2 Dana Darurat 7.3 Penerimaan lain (sesuai dengan peraturan perundangan)	Kuliah, Diskusi, Tugas kecil 06
	Ujian Mid Semester		Take home exam
08	Manajemen Pengeluaran Dana atau Belanja Daerah	8.1 Klasifikasi Belanja Daerah (Belanja Rutin & B. Modal) 8.2 Analisis Standar Belanja 8.3 Public Expenditure Management Principles	Kuliah, Diskusi, Tugas kecil 07
09	Manajemen Dana	9.1 Prinsip Umum Pinjaman Daerah	Kuliah,

	Pinjaman Daerah	9.2 Persyaratan Umum Pinjaman Daerah 9.3 Perencanaan dan Pertanggungjawaban Pembayaran Hutang	Diskusi, Tugas kecil 08
10	Asset Daerah sebagai Sumber Pembiayaan	10.1 Inventarisasi dan Pencatatan Status Asset Daerah 10.2 Penilaian Asset Daerah 10.3 Pengelolaan Optimalisasi Utilisasi Asset Daerah	Kuliah, Diskusi, Tugas kecil 09
11	Program Kemitraan: Bagian Kegiatan Pembiayaan	11.1 Bentuk-Bentuk Kemitraan 11.2 Proses Kemitraan 11.3 Kriteria dan Bidang Kegiatan untuk Kemitraan	Kuliah, Diskusi, Tugas kecil 10
12	Sistem Penganggaran Daerah	12.1. Pergeseran paradigma penyusunan Anggaran 12.2. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) 12.3. Komponen implementasi ABK 12.4. Tahapan dan proses Penyusunan APBD	Kuliah, Diskusi, Tugas kecil 11
13	Kasus 1 & 2	13.1. Intensifikasi Pajak Daerah – Kabupaten Sleman 13.2. Restrukturisasi BUKP DIY vs BKK Kabupaten Wonogiri	Diskusi, Tugas kecil 12
14	Kasus 3 & 4	14.1. <i>Idle cash management</i> - Kabupaten Wonogiri 14.2. Dikembangkan dari kelas	Diskusi, Tugas kecil 13
	Ujian Akhir Semester		Take home exam

E. EVALUASI PROSES BELAJAR MENGAJAR

1. Tugas mingguan : 30%
2. Ujian Mid Trimester : 20%
3. Tugas Akhir Trimester : 30%
4. Ujian Akhir Semester : 20%

F. REFERENSI

Jones, B.M (1996) *Financial Management in the Public Sector*, London: McGraw-Hill. (J)
 Brigham, E.F. (2004) *Fundamental of Financial Management*, 10th Ed, NY: SW Learning. (B)
 Jones, Rand Pendlebury, M. (1996) *Public Sector Accounting*, 5th Ed., London: Pitman. (J & P)
 Coe, C.K. (1989) *Public Financial Management*, Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall. (C)
 Nicholls, D. (1991) *Managing State Finance*, New South Wales: Treasury. (N)

Undang-Undang (UU):

1. Undang-Undang R.I. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang R.I. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang R.I. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang R.I No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-Undang R.I. No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
7. PP No. 58 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
8. PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
9. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
10. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
11. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah.
12. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Lain-lain sumber ditentukan di kelas